

Analisis Laporan Ikhtisar Realisasi Anggaran Untuk Menilai Pencapaian Kinerja Keuangan Pada Kantor Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Khadijah Dinda Putri Dewi

Arnida Wahyuni Lubis

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: khaa.dindaa24@gmail.com, arnidawahyuni@gmail.com

ABSTRACT

Budget Realization Report is a report that describes the realization of income, expenditure and financing for a period. Financial performance is a performance measure that uses financial indicators. This study aims to assess the financial performance of the North Sumatra Province Environmental Service Government Office for the 2018-2021 period by using the analysis of the Revenue Budget Variance Analysis, the Decentralization Degree Ratio, the Effectiveness Ratio of Regional Original Revenue, the Regional Expenditure Efficiency Ratio, and the Regional Expenditure Harmony Ratio. This research method uses a quantitative descriptive approach. The analysis method is carried out by assessing or measuring local government financial performance which is measured based on: Income Variance Analysis, Decentralization Degree Ratio, Regional Expenditure Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio of Regional Original Revenue, Regional Expenditure Harmony Ratio. The results of research on financial performance at the North Sumatra Province Environmental Service show that 1) Realization of the revenue budget in 2021 is unfavorable but is good if viewed from the whole during the 2018-2021 period. 2) from the Decentralization Degree, showing a ratio of 100%, it can be concluded that the ratio is classified as very good. 3) Regional Expenditure Financial Performance with an average percentage ratio of 90.15% which is on a less efficient interval scale. 4) The PAD Effectiveness Ratio is said to be effective with an average percentage ratio of 120.43% which is included in the very Effective criteria. 5) Shopping Harmony can be concluded that the average percentage ratio is 83,02%.

Keywords: Budget Realization Report, Financial Performance, Regional Financial Ratio

Pendahuluan

Akuntansi keuangan (pemerintahan) di Indonesia terutama akuntansi keuangan wilayah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang menerima perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi Tahun 1998. Hal tersebut ditimbulkan adanya kebijakan barupemerintah Republik Indonesia yang "mereformasi" berbagai macam hal, termasuk Laporan Realisasi Anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah. (Halim, 2008)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada suatu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelpaoan. (2005, 2007)

Dalam laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada suatu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggara entitas pelpaoan. Laporan Realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas.

Dalam rangka mempertinggi perekonomian suatu wilayah, salah satu yang harus dicapai adalah kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang

menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas serta potensi-potensi kinerja yang akan berkelanjutan.

Fenomena yang di ambil dalam penelitian ini mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Penilaian terhadap Kinerja Keuangan Kantor Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Data di dapatkan dari laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2021 yang di nyatakan sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2019

Tahun	Pendapatan		PAD	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2018	900.000.000,00	1.333.556.000,00	900.000.000,00	1.333.556.000,00
2019	1.333.556.000,00	1.763.553.000,00	1.333.556.000,00	1.763.553.000,00
2020	1.333.556.000,00	1.645.737.000,00	1.333.556.000,00	1.645.737.000,00
2021	1.800.000.000,00	1.405.933.000,00	1.800.000.000,00	1.405.933.000,00
Tahun	Belanja		Belanja Operasi	
	Anggaran	Realisasi	Realisasi	
2018	69.823.399.391,68	60.965.613.092,00	45.121.943.167,00	
2019	69.264.838.322,00	62.321.121.103,00	51.449.888.090,00	
2020	43.916.792.891,00	42.166.217.397,00	34.959.823.022,00	
2021	39.699.236.198,00	34.677.075.940,00	32.123.138.740,00	

Sumber: DLH Prov. SU

Berdasarkan table di atas dapat di lihat bahwa anggaran dan realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 sampai tahun 2021 berbeda di setiap tahunnya dan selalu meningkat. Sedangkan anggaran dan realisasi belanja daerah pada tahun 2019 meningkat dan menurun pada tahun 2021.

Jelas terlihat bahwa pendapatan dan belanja daerah yang berfluktuasi maka perlu dilakukan analisis laporan ikhtisar keuangan untuk menialai atau mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang dikur berdasarkan Analisis Varians Anggaran Pendapatan, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Belanja Daerah, Rasio Keserasian Belanja Daerah. Penilaian atau pengukuran kinerja tersebut dilakakukan untuk menilai kinerja keuangan, apakah sudah signifikan ataukah belum. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian sebagai hasil magang, dengan judul **"Analisis Laporan Ikhtisar Realisasi Anggaran Untuk Menilai Pencapaian Kinerja Keuangan Pada Kantor Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara"**

Dengan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini yaitu: "Bagaimana kinerja keuangan Kantor Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di lihat dari: Analisis Varians Anggaran Pendapatan, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Belanja Daerah, Rasio Keserasian Belanja Daerah?"

Tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis ialah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Kantor Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2021 dengan menganalisis laporan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan menggunakan analisis rasio keuangan daerah: Analisis Varians Anggaran Pendapatan, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Belanja Daerah, Rasio Keserasian Belanja Daerah.

Kajian Teori

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan

peringkasan atas transaksi dan/ atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (Permendagri, 2006)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 pasal 64 ayat (2) APBD dapat di definisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek daerah selama satu anggaran tertentu. (2005, 2007)

Laporan Realisasi Anggaran

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran dalam pasal 1 ayat 4 adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (2005, 2007)

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu factor yang menunjukkan efektifitas dan efesiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Kinerja keuangan adalah suatu analisi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. (Hutabarat, 2020)

Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas serta potensi-potensi kinerja yang akan berkelanjutan.

Analisis Varians Anggaran Pendapatan

Merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi pendapatan dan anggaran. Selisih antara keduanya telah di informasikan atau tertera dalam LRA yang telah di sajikan oleh pemerintah daerah. Informasi tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja keuangan pendapatan (Fitra, 2019). Analisis Varians Anggaran Pendapatan dapat di hitung sebagai berikut:

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Realisasin} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

Rasio Derajat Desentralisasi

Analisis ini biasanya di hitung berdasarkan perbandingan antara pendapatan daerah dan total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio Derajat Desentralisasi dapat di hitung sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio ini dapat di ukur dalam kriteria, sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi

Persentase PAD terhadap total Penerimaan Daerah	Tingkat Desentralisasi
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,00 - 20,00	Kurang
20,00 - 30,00	Sedang
30,00 - 40,00	Cukup
40,00 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri ± Fisipol UGM, 1991

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Analisis rasio ini di hitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan anggaran PAD. Semakin tinggi rasio efektifitas, maka semakin baik pula kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD. Rasio ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Secara umum kriteria penilaian Efektifitas PAD, sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Rasio Efektifitas PAD

Persentase PAD terhadap total Penerimaan Daerah	Tingkat Efektifitas
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
0-60	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, No. 690.900.327, 1996

Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Analisis rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi belanja dengan anggarannya. Rasio ini di ukur untuk mengetahui dan mengukur tingkat penghematan anggaran yang di lakukan pemerintah daerah. Semakin kecil persentase rasi efesiensinya maka dapat di katakan pemerintah daerah melakukan dengan baik anggaran yang di berikan. Jika sebaliknya maka dapat diidentifikasi bahwa terjadi pemborosan anggaran. Rasio ini dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menilai kinerja keuangan daerah, maka dapat ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Efisiensi Belanja Daerah

Persentase PAD terhadap total Penerimaan Daerah	Tingkat Efektifitas
>100	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Efisien
0-60	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.32

Rasio Kerasian Belanja Daerah

Analisis rasio ini di hitung dengan cara membandingkan total belanja operasi dengan belanja daerah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Berikut ini adalah kriteria untuk menilai

Rasio ini dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5. Kriteria Kerasian Belanja Daerah

Persentase PAD terhadap total Penerimaan Daerah	Tingkat Efektifitas
-------------------------------------------------	---------------------

0-20	Tidak Serasi
20-40	Kurang Serasi
40-60	Cukup Serasi
60-80	Serasi
80-100	Sangat Serasi

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327, 2006

Penelitian Terdahulu

(Sihombing, 2019) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Keserasian, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah pada periode 2013-2017. Metode yang di gunakan adalah deskriptif untuk menilai kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Analisis data rasio derajat desentralisasi menunjukkan angka rata-ratanya sebesar 100%, analisis yang sangat baik dan kemampuannya dalam menyelenggarakan desentralisasi sudah baik.
2. Analisis data Rasio Keserasian Belanja menunjukkan angka rata-ratanya sebesar 91,58%, persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin ialah tinggi.
3. Analisis data Rasio Efektivitas PAD menunjukkan interval 60-80%, berarti pada Dinas Lingkungan Hidup kurang dapat merealisasikan PAD yang direncanakan dengan baik.
4. Analisis data rasio Efisiensi Belanja Daerah dengan angka rata-rata 89,45% rasio Efisiensi Belanja Daerah

Metode Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Peneliti menganalisis Laporan Realisasi Anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada kantor tersebut dalam periode 2018-2019 dengan menggunakan Analisis Varians Anggaran Pendapatan, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Belanja Daerah, Rasio Keserasian Belanja Daerah. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang di kumpulkan dari pihak lain. Data tersebut merupakan dokumentasi dari ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, yang dimana data ini adalah data runtut waktu tahun 2018-2021.

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena dalam penelitian ini data yang dikumpulkan, disusun, dianalisis, dan menginterpretasikan dengan cara mendeskripsikan hasil yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, bukti yang telah ada, atau arsip data yang telah terkumpul yang sesuai dengan data sekunder yang dibutuhkan dan kemudian diolah oleh peneliti.

Berdasarkan uraian penjelasan pendapatan dan belanja daerah yang berfluktuasi maka metode analisa yang dilakukan dengan penilaian atau pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang dikur berdasarkan tingkat: Analisis Varians Pendapatan, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efisiensi Belanja Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Keserasian Belanja Daerah.

Hasil Dan Pembahasan

Data yang di peroleh untuk penelitian ini adalah data yang sudah di olah atau juga di sebut dengan data sekunder yang di dapat dari Kantor Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara. Adapun data yang di gunakan yaitu informasi Laporan Realisasi Anggaran dari kantor pemerintahan tersebut. Dalam penelitian ini kinerja keuangan di ukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah, yaitu: Analisis Varians Anggaran Pendapatan, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Belanja Daerah, Rasio Keserasian Belanja Daerah yang akan di tampilkan sebagai berikut:

1. Analisis Varians Pendapatan

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung perbedaan atau selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran. Jika realisasi pendapatan dibawah jumlah yang di anggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik, begitu juga sebaliknya.

Tabel 6. Analisis Varians Pendapatan Periode 2018-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Varian Pendapatan (%)	Kriteria
2018	1.333.556.000,00	900.000.000,00	433.556.000	Baik
2019	1.763.553.000,00	1.333.556.000,00	429.997.000	Baik
2020	1.645.737.000,00	1.333.556.000,00	312.181.000	Baik
2021	1.405.933.000,00	1.800.000.000,00	-394.067.000	Kurang Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara

Berdasarkan perhitungan data pada tabel di atas dapat di simpulkan bahwa Analisis Varian Pendapatan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2020 dapat di kategorikan tergolong baik. Hal ini di tunjukkan dengan prolehan pendapatan yang melebihi dengan jumlah anggaran. Namun pada tahun 2021 pendapatan lebih kecil dari jumlah anggaran yang mengakibatkan terjadinya minus pada varians pendapatan, ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dapat dikatakan kurang baik.

2. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan drajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

1) Tahun 2018

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{1.333.556.000}{1.333.556.000} \times 100\% = 100\%$$

2) Tahun 2019

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{1.763.553.000}{1.763.556.000} \times 100\% = 100\%$$

3) Tahun 2020

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{1.645.767.000}{1.645.767.000} \times 100\% = 100\%$$

4) Tahun 2020

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{1.405.933.000}{1.405.933.000} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 7. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Periode 2018-2021

Tahun	PAD	Total PAD	Derajat Desentralisasi (%)	Kriteria
2018	1.333.556.000,00	1.333.556.000,00	100	Sangat Baik
2019	1.763.553.000,00	1.763.553.000,00	100	Sangat Baik
2020	1.645.737.000,00	1.645.737.000,00	100	Sangat Baik
2021	1.405.933.000,00	1.405.933.000,00	100	Sangat Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2021 menunjukkan angka rasio sebesar 100%, maka dapat di simpulkan rasio tersebut tergolong sangat baik dan ini menunjukkan Kantor Pemerintahan DLH Prov. SU melakukan kinerja yang sudah berada dalam kedesentralisasian yang sangat baik.

3. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Angka yang di dihasilkan dari rasio efesiensi ini tidak bersifat absolute, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang yang di anggap baik untuk rasio ini. Jika rasio lebih dari 100% maka mengindikasikan bahwa telah terjadi pemborosan anggaran. Semakin kecil angka rasio semakin baik pula kinerja pemerintahan.

1) Tahun 2018

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{60.965.613.092}{69.823.399.391,68} \times 100\% = 87,31\%$$

2) Tahun 2019

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{62.321.121.103}{69.246.838.322} \times 100\% = 89,97\%$$

3) Tahun 2020

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{42.166.217.397}{43.916.792.891} \times 100\% = 96,01\%$$

4) Tahun 2020

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{34.677.075.940}{439.699.236.198} \times 100\% = 96,01\%$$

Tabel 8. Analisis Rasio Efesiensi Belanja Daerah Periode 2018-2021

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Efesiensi (%)	Kriteria
2018	69.823.399.391,68	60.965.613.092,00	87,31	Cukup Efisien
2019	69.264.838.322,00	62.321.121.103,00	89,97	Cukup Efisien
2020	43.916.792.891,00	42.166.217.397,00	96,01	Kurang Efisien
2021	39.699.236.198,00	34.677.075.940,00	87,34	Cukup Efisien

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara

Analisis Rasio Efesiensi Belanja Daerah menunjukkan bahwa Kantor Pemerintahan DLH Prov. SU telah melakukan efesiensi belanja untuk periode 2018-2021. Jika angka yang di dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan efesiensi anggaran.

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat pada tahun 2018 dengan presentase 87,31%; d tahun 2019 dengan presentase 89,97%; di tahun 2020 dengan presentase 6,01%, pada tahun ini rasio efesiensi belanja daerah mengalami kenaikan, maka dengan presentase rasio tersebut dapat digolongkan dalam kriteria kurang efisien. Pada tahun 2021 dengan presentase 87,34%.

4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD di hitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang di anggarakan. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD maka semakin baik kinerja pemerintahan daerah.

1) Tahun 2018

$$\text{Rasio Efesiensi Belanja} = \frac{1.333.556.000}{900.000.000} \times 100\% = 148\%$$

2) Tahun 2019

$$\text{Rasio Efesiensi Belanja} = \frac{1.763.553.000}{1.333.556.000} \times 100\% = 132,24\%$$

3) Tahun 2020

$$\text{Rasio Efesiensi Belanja} = \frac{1.645.737.000}{1.333.556.000} \times 100\% = 132,24\%$$

4) Tahun 2021

$$\text{Rasio Efesiensi Belanja} = \frac{1.405.933.000}{1.800.000.000} \times 100\% = 78,10\%$$

Tabel 9. Analisis Rasio Efektifitas PAD Periode 2018-2021

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2018	900.000.000,00	1.333.556.000,00	148	Sangat Efektif
2019	1.333.556.000,00	1.763.553.000,00	132,24	Sangat Efektif
2020	1.333.556.000,00	1.645.737.000,00	123,40	Sangat Efektif
2021	1.800.000.000,00	1.405.933.000,00	78,10	Kurang Efektif

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara

Berdasarkan tabel di atas, anggaran pendapatan lebih kecil daripada realisasinya itu dikatakan baik. Anggaran PAD pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan perhitungan tabel di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas PAD Dinas Lingkungan Hidup Pro. SU pada tahun 2018 sebesar 148%; pada tahun 2019 sebesar 132,24%; pada tahun 2020 sebesar 123,40%; dan pada tahun 2021 presentase sebesar 78,10% digolongkan dalam kriteria kurang efektif dikarenakan anggaran pendapatan lebih besar di bandingkan realisasi pendapatan.

5. Rasio Kecerassian Belanja Daerah

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Semakin tinggi presentase dana yang di alokasikan, maka semakin kecil pula sarana dan prasarana masyarakat.

1) Tahun 2018

$$\text{Rasio Efesiensi Belanja} = \frac{45.121.943.167}{60.965.613.092} \times 100\% = 74,01\%$$

2) Tahun 2018

$$\text{Rasio Efesiensi Belanja} = \frac{51.449.888.090}{62.321.121.103} \times 100\% = 82,55\%$$

3) Tahun 2018

$$\text{Rasio Efesiensi Belanja} = \frac{34.959.823.022}{42.166.217.397} \times 100\% = 82,90\%$$

4) Tahun 2018

$$\text{Rasio Efesiensi Belanja} = \frac{32.123.138.740}{34.677.075.940} \times 100\% = 92,63\%$$

Tabel 10. Analisis Rasio Kecerassian Belanja Daerah Periode 2018-2021

Tahun	Total Belanja	Total Belanja Operasi	Rasio Kecerassian (%)	Kriteria
2018	60.965.613.092,00	45.121.943.167,00	74,01	Serasi
2019	62.321.121.103,00	51.449.888.090,00	82,55	Sangat Serasi
2020	42.166.217.397,00	34.959.823.022,00	82,90	Sangat Serasi
2021	34.677.075.940,00	32.123.138.740,00	92,63	Sangat Serasi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara

Berdasarkan perhitungan tabel di atas dapat di ketahui bahwa rasio keserasian belanja operasi pada Kantor DLH Prov. SU peropde 2018-202z mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 dengan persentase keserasian sebesar 74,01%; pada tahun 2019 dengan persentase keserasian sebesar 82,55%; pada tahun 2020 dengan persentase keserasian sebesar 82,90%; dan pada tahun 2021 dengan persentase keserasian sebesar 92,63%. Dengan demikian rasio keserasian belanja operasional pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tergolong dalam kriteria sangat serasi yang berarti persentase dana yang di alokasikan untuk belanja rutin sangat tinggi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Magang adalah kegiatan dan program yang di adakan secara individu maupun lembaga program magang yang di gunakan sebagai sarana dalam memberikan gambaran real dunia kerja. Selain itu, magang adalah sarana individu maupun lembaga untuk memberikan pembelajaran cara berkomunikasi atau cara berhubungan sesama dan peronil yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. (Rosa Nikmatul Fajri, 2018)
2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah di uraikan sebelumnya pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2021 dengan analisis rasio keuangan penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 1. Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2021, maka dapat di simpulkan bahwa Realisasi Anggaran pendapatan pada tahun 2021 tidak menguntungkan namun sudah baik jika di lihat dari keseluruhan selama periode 2018-2021.
 2. Hasil analisis Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2021 di lihat dari Derjat Desentralisasi, menunjukkan angka rasio sebesar 100%, maka dapat di simpulkan rasio tersebut tergolong sangat baik dan ini menunjukkan Kantor Pemerintahan DLH Prov. SU melakukan kinerja yang sudah berada dalam kedesentralisasian yang sangat baik.
 3. Kinerja Keuangan Belanja Daerah pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2021, dengan rata-rata rasio persentase sebesar 90,15% yang berada pada sekala interval kurang efesien dan tidak terdapat jumlah realisasi anggaran melebihi jumlah anggaan yang di tetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah melakukan efesiensi belanja.
 4. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah menggunakan rasio Efektifitas PAD pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2021, dikatakan efektif dengan rasio persentasi rata rata sebesar 120,43% termasuk dalam kreteria sangat Efektif. Dapat dikatakan pemerintah daerah menunjukkan kemampuannya dalam mencapai anggaran pendapatan.
 5. Dari analisis Kesorasian Belanja dapat di simpulkan bahwa Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2021, menunjukan angka rata-rata persentasi rasio sebesar 83,02% yang berarti rasio kesorasian belanja dapat digolongkan dalam kriteria sangat serasi. Dapat di simpulkan belanja rutin pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2021 memiliki sekala tinggi.

Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara, diharapkan semakin maksimal dalam mewujudkan visi & misi nya.
2. Instansi memberikan pengarahana dan pelatihan tentang pekerjaan yang sesuai dengan bidang pendidikan yang ditekuni oleh penulis di bangku perkuliahan, sehingga pengetahuan penulis terhadap dunia kerja menjadi semakin luas.
3. Disarankan bagi Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara lebih meningkatkan pencapaian kinerjanya dalam laporan realisasi anggaran agar lebih optimal di tahun berikutnya

Referensi

- Berkas dan dokumen Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara.
- Kieso E. Donald, Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate* edisi kedua belas jilid 1. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- 2005, P. R. N. 24 T. (2007). *Sap: Standar Akuntansi Pemerintahan* (I). Pustaka Yustisia.
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah* (Cakti Indra Gunawan (ed.); 1st ed.). IRDH Book Publisher.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah* (R. Widyaningrum (ed.); 3rd ed.). Salemba Empat.
- Hutabarat, F. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan* (G. Puspitasari (ed.); 1st ed.). Desanta Muliavisitama.



Balance :

Jurnal Akuntansi dan Manajemen

- Permendagri. (2006). *Permendagri No.13/2006*. 1–73.
- Rosa Nikmatul Fajri. (2018). *Perencanaan, Pelaksanaan, Penulisan Laporan Pemagangan (Panduan Praktis Mahasiswa yang Akan Menyongsong Dunia Kerja yang Disertai dengan Contoh Laporan Magang)* (I. M. Sartono (ed.); 1st ed.). CV BUDI UTAMA.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah / penulis, Mahmudi* (Edisi keti). Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.
- Rahayu, R. P. (2016). Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. *Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(01). <https://doi.org/10.36467/makro.2016.01.01.05>
- Sihombing, H. (2019). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2013-2017. *JURNAL STINDO PROFESIONAL*, V(September), 140–156.